

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Chandler dan Plano dalam *The Public Administration Dictionary* (1988) mengemukakan mengenai administrasi publik adalah suatu tahapan dalam melaksanakan regulasi, yang mana administrasi negara berfokus pada pelaksanaan hukum serta penerapan peraturan dan regulasi dalam implementasi kebijakan publik. Sedangkan menurut Keban (2008), administrasi publik mencerminkan peran pemerintah merupakan otoritas yang memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengambil inisiatif demi kepentingan masyarakat, yang dalam hal ini dipandang sebagai pihak yang pasif dan tunduk pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari pengelolaan organisasi publik, berbeda dengan manajemen yang fokus pada organisasi swasta. Kajian administrasi publik meliputi pengelolaan organisasi pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga pusat, serta aspek birokrasi, penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, termasuk administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan prinsip *good governance*.

Salah satu ciri administrasi publik adalah upayanya untuk memfokuskan kembali pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan menggunakan berbagai pendekatan. Gerald Caiden, dalam Thoha (2007, h.7), menyatakan bahwa fungsi utama administrasi publik adalah menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Permasalahan ini harus diselesaikan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh George J. Gordon dalam

Sjamsiar (2006, h.117), administrasi publik mencakup semua rangkaian tahapan dilakukan oleh institusi atau perseorangan, berhubungan dengan implementasi serta pelaksanaan regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Islamy (2007, h.10) menyatakan hubungan antara administrasi publik dan masalah yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan sejauh mana negara mempengaruhi kepentingan publik. Keputusan-keputusan yang diambil oleh negara untuk menyelesaikan masalah publik membentuk mekanisme yang melahirkan konsep kebijakan publik. Definisi kebijakan publik ini diperjelas oleh Jenkins (1978) dalam Abdul Wahab (2016) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian kebijakan yang berkesinambungan, ditetapkan oleh pemangku kebijakan atau sekelompok pemangku kepentingan, yang difokuskan pada perwujudan sasaran tertentu serta metode pencapaiannya dalam suatu situasi tertentu. Keputusan diambil dalam batas kewenangan aktor kebijakan yang berwenang. Dengan demikian, kebijakan publik dimaknai seperti keputusan strategis yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki otoritas guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Administrasi publik memegang peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Sebagai inti penyelenggaraan pemerintahan, administrasi publik dituntut untuk menjadi penyelesaian terhadap beragam permasalahan yang timbul dalam masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan publik secara efektif. Selain itu, administrasi publik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan

masyarakat. Peran ini membantu memperkuat pemahaman terhadap hubungan kedua pihak, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya bertujuan menjamin efektivitas dan efisiensi kebijakan, serta menjamin bahwa kebijakan membawa manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat.

Alinea keempat dalam Pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan umum untuk mewujudkan tujuan nasional. Tanggung jawab tersebut meliputi penyusunan kebijakan di berbagai sektor kesejahteraan serta peningkatan mutu pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental bagi setiap warga negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera, dengan kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki tempat tinggal, serta menikmati lingkungan yang sehat dan layak. Deacon menambahkan bahwa dalam negara kesejahteraan, pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negara dijamin mendapatkan pendapatan minimum serta akses memadai terhadap kebutuhan dasar seperti perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan layanan sosial, diwujudkan melalui layanan sosial yang disediakan negara untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Penyediaan perumahan dan permukiman yang layak menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya

ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan tempat tinggal yang layak menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang dianggap layak huni adalah rumah yang memenuhi standar keselamatan bangunan, memiliki ukuran yang cukup, menjamin kesehatan penghuni, serta dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat. Tanggung jawab tersebut selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pilar 11, yang bertujuan untuk menciptakan kota dan permukiman yang berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Infografik 17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sumber: <https://sdgs.un.org/goals>

Pilar ke-11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki tujuan menjamin akses perumahan layak, aman, serta dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat, dan melakukan penataan terhadap kawasan kumuh. Selain itu, tujuan ini juga mencakup penyediaan jangkauan terhadap sistem transportasi yang aman, ekonomis, mudah digunakan, serta berorientasi pada keberlanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya serta alam dunia, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan dampak bencana, mengurangi dampak lingkungan di kawasan perkotaan, berupa pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan, serta menyediakan

fasilitas ruang publik dan ruang hijau terbuka yang aman dan terbuka untuk semua orang. Upaya ini difokuskan pada meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang terintegrasi dengan upaya adaptasi perubahan iklim serta peningkatan ketahanan terhadap bencana. (Kementerian PPN, 2020).

Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap permasalahan permukiman, terutama dalam upaya mengatasi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui berbagai kebijakan, seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan sejumlah program peningkatan infrastruktur permukiman, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan rumah yang memenuhi standar kelayakan, aman, dan memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat penghasilan rendah. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia, yang termasuk dalam jajaran negara dengan populasi terbesar, diperkirakan memiliki sekitar 279.390.258 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan populasi Indonesia tercatat sebesar 0,82%, meningkat dari 277.534.122 jiwa pada tahun 2023 (Kompas, 2024).

Tingginya laju pertumbuhan penduduk menjadi perhatian utama bagi Indonesia, karena berdampak signifikan terhadap eksploitasi sumber daya alam, kelestarian lingkungan, dan ketersediaan ruang. Permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini adalah pertumbuhan populasi yang cepat, tanpa diimbangi oleh kesiapan infrastruktur yang memadai. Fenomena ini semakin mencuat akibat kurangnya antisipasi terhadap kebutuhan dan kapasitas kota. Lonjakan populasi di banyak kota dapat dijelaskan oleh dua faktor utama, yaitu pertumbuhan alami penduduk yang berkelanjutan, dan arus urbanisasi yang meningkat akibat mobilitas

penduduk yang tinggi (Prayojana et al., 2020:13). Peningkatan populasi yang signifikan tidak hanya memengaruhi jumlah penduduk, namun pada lingkungan sekitarnya, seperti munculnya permukiman kumuh di lahan kosong di perkotaan (Trifita & Amaliyah, 2020). Secara tidak langsung, masalah ini dapat menghambat upaya mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam menangani permasalahan permukiman di wilayah perkotaan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang efektif. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menempatkan kawasan permukiman kumuh sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya perbaikan tata kota. Berbagai langkah strategis telah dirancang dan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang tercermin dalam penetapan target nasional di sektor perumahan dan permukiman sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang ditetapkan mencakup peningkatan akses terhadap 100% air minum layak, dengan 30% di antaranya melalui jaringan perpipaan, serta pencapaian 90% akses sanitasi layak, dengan 15% di antaranya berupa sanitasi yang aman. Selain itu, pemerintah menargetkan penanganan permukiman kumuh seluas 10.000 hektare dan memastikan seluruh hunian perkotaan memiliki akses pengelolaan sampah yang baik.

Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagai tindak lanjut dari Perpres

tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya kawasan kumuh baru serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan tertata dengan baik. Penanganan permukiman kumuh dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Direktorat Jenderal Cipta Karya memulai langkah strategis dengan mengembangkan platform kolaboratif melalui kebijakan pencegahan dan perbaikan kualitas perumahan serta permukiman kumuh, salah satunya lewat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU dijalankan sebagai kebijakan strategis untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung tercapainya tujuan 'Gerakan 100-0-100'. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan akses air minum yang merata bagi seluruh penduduk, menghapuskan permukiman kumuh, dan menyediakan akses sanitasi yang layak bagi setiap orang. Fokus utamanya adalah untuk memperbaiki ketersediaan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan, guna menciptakan permukiman perkotaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. (kotaku.pu, 2016).

Program KOTAKU mendampingi pemerintah daerah sebagai pihak utama dalam menangani permukiman kumuh untuk menciptakan lingkungan yang layak huni, salah satunya dengan memperkuat kembali peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Sehubungan dengan itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya menerbitkan Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 yang merumuskan pedoman umum pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pelaksanaan Program KOTAKU terdiri dari empat tahap, yaitu

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Menangani masalah permukiman kumuh, KOTAKU tidak hanya bertujuan untuk memindahkan penduduk ke tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga berfokus pada perbaikan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan. KOTAKU dirancang untuk menyokong pembangunan permukiman perkotaan yang memenuhi standar kelayakan hunian. Program ini dijalankan secara nasional, meliputi 271 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh, yang dilaksanakan melalui Program KOTAKU, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan permukiman yang tidak layak huni. Hal ini diakibatkan karena tingginya kepadatan penduduk, keterbatasan lahan, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selama lima tahun terakhir, terjadi perluasan yang cukup signifikan terhadap wilayah permukiman tidak layak huni di Indonesia, dengan pertumbuhan lebih dari dua kali lipat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di daerah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa (www.caritra.org, 2020). Berdasarkan data dari Datawarehouse Cipta Karya Tahun 2019-2020, besaran kawasan permukiman kumuh di Indonesia tahun 2019 tercatat 48.063,04 hektar, dan mengalami kenaikan signifikan menjadi 99.017,36 hektar pada tahun 2020.

Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan luas kawasan kumuh, pada tahun 2019 mencapai 7.300,71 hektar, dan meningkat menjadi 8.912,33 hektar pada tahun 2020. Peningkatan ini mencerminkan masalah serius yang dihadapi dalam pengelolaan permukiman kumuh, serta menunjukkan perlunya intervensi

yang lebih efektif untuk mengatasi isu tersebut. Dalam rangka mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh, dibutuhkan langkah-langkah penyelesaian yang mencakup pembangunan lingkungan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan. Sesuai dengan Surat Edaran terkait Program KOTAKU oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, tujuan program ini adalah untuk memperkuat upaya Pemerintah Daerah dalam memperluas akses masyarakat ke infrastruktur dan layanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan, guna menciptakan permukiman yang memenuhi standar kelayakan, produktif, dan ramah lingkungan.

Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (RTRW Kota Semarang), mengatur terkait Kebijakan Penataan Ruang yang terdiri dari dua belas kawasan. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Semarang, diputuskan kebijakan penataan ruang yang mencakup dua belas kawasan strategis di Kota Semarang. Kebijakan ini diperkuat dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2022-2026, bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh demi terciptanya lingkungan lebih layak huni dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Semarang memuat langkah-langkah aksi untuk menangani dan mencegah perkembangan permukiman kumuh

perkotaan yang direncanakan oleh Pokja Kabupaten/Kota. Dokumen ini merinci kebijakan makro yang fokus pada pencegahan perluasan kawasan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota, sekaligus menetapkan konsep penanganan kawasan kumuh sebagai prioritas. Dalam pelaksanaannya, RP2KPKPK berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan strategi sektoral dan rencana induk terkait komponen permukiman. Di Kota Semarang, dokumen ini disusun dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan serta dokumen perencanaan kawasan kumuh, baik yang difasilitasi oleh Direktorat Cipta Karya maupun pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Semarang, dalam melakukan penanganan dan pengembangan kawasan prioritas (permukiman kumuh), diperlukan tujuan, pendekatan, dan konsep penanganan yang sesuai dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, peluang, serta hambatan yang terdapat di wilayah tersebut. Yang tercantum dalam lampiran dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada Bab V mengenai konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Identifikasi kebutuhan penanganan serta konsep yang diterapkan dalam strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Semarang mencakup upaya perbaikan kualitas permukiman melalui rehabilitasi, pembaruan, dan relokasi.

Pemugaran adalah memperbaiki atau membangun kembali perumahan dan permukiman agar memenuhi standar kelayakan huni, dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih baik serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum pemugaran dilaksanakan, perlu disediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak, dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan

sebelumnya. Sementara itu, peremajaan dilakukan melalui penataan menyeluruh, termasuk perbaikan infrastruktur, untuk meningkatkan kualitas hunian. Pemukiman kembali adalah proses pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak dapat dibangun kembali, baik karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau berisiko tinggi terhadap bencana.

Pemahaman mengenai pendekatan dalam mengatasi perumahan dan permukiman kumuh memiliki peran krusial, terutama menghadapi permasalahan di Kota Semarang yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kota ini memiliki kerentanan terhadap berbagai persoalan lingkungan, seperti banjir dan abrasi, yang semakin memperburuk kondisi kawasan permukiman kumuh. Area permukiman kumuh di Kota Semarang umumnya berada di wilayah pinggiran, sepanjang jalur rel kereta api, serta di sekitar sungai, dengan karakteristik dataran rendah dan berbatasan dengan perairan. Permasalahan yang sering terjadi di wilayah ini mencakup pengelolaan sampah yang tidak optimal, keterbatasan akses jalan, serta sistem drainase yang kurang memadai. Di Kota Semarang, kawasan permukiman kumuh terdiri atas berbagai macam, seperti permukiman pesisir, permukiman di pinggiran kota, kawasan pusat kota, permukiman dengan kepadatan bangunan tinggi, permukiman baru, kawasan yang rentan terhadap luapan air laut, permukiman di sekitar sungai, serta permukiman yang terletak di pinggiran sungai dan dekat lahan pertanian.

Penentuan lokasi permukiman kumuh di Kota Semarang didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Semarang No. 050/275 Tahun 2021 mengenai penetapan lokasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Semarang.

Berdasarkan SK lokasi tersebut, Kota Semarang memiliki 45 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan dengan luas permukiman kumuh seluas 431,54 hektar. Salah satu lokasi kumuh yang paling luas berada di Kecamatan Semarang Utara. Data tentang luas kawasan permukiman kumuh Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2021 dapat ditemukan pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Lokasi Kumuh Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021

Lokasi	Luas Permukiman (Ha)	Skoring	Tingkat Kekumuhan
Bandarharjo	4,26	24	Kumuh Ringan
Bulu Lor	1,85	22	Kumuh Ringan
Dadapsari	25,32	18	Kumuh Ringan
Kuningan	14,10	18	Kumuh Ringan
Panggung Kidul	5,47	18	Kumuh Ringan
Plombokan	4,83	20	Kumuh Ringan
Purwosari	2,84	17	Kumuh Ringan
Tanjungmas	17,34	16	Kumuh Ringan

Sumber: SK Walikota Semarang No. 050/275 Tahun 2021

Kecamatan Semarang Utara memiliki 8 kelurahan dengan luas kawasan kumuh terbesar, mencapai 60,1 hektar. Dalam upaya mengatasi permasalahan kawasan kumuh di Kecamatan Semarang Utara, terutama di Kelurahan Bandarharjo, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui pelaksanaan Program KOTAKU, dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai peta Kelurahan Bandarharjo dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1. 2 Peta Kawasan Kelurahan Bandarharjo
 Sumber: <https://bandarharjo.semarangkota.go.id>

Kelurahan tersebut terletak di sepanjang pantai Kota Semarang dengan luas wilayah sekitar 342,68 hektar, yang terbagi menjadi 12 RW dan 103 RT. Daerah Bandarharjo terletak di sekitar Terminal Peti Kemas, yang merupakan bagian integral dari kompleks Pelabuhan Tanjung Mas di Kota Semarang. Kelurahan Bandarharjo memiliki total populasi sebanyak 20.233 individu, yang tersebar dalam 4.429 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.674 kepala keluarga diklasifikasikan sebagai miskin, dengan sebagian besar dari mereka berprofesi di sektor industri Pengasapan Ikan, sehingga membuat wilayah ini dijuluki sebagai Sentra Pengasapan Ikan di Kota Semarang. Namun demikian, tidak hanya itu, sebagian besar penduduk Bandarharjo juga memiliki pekerjaan sebagai nelayan, pengrajin, dan buruh di sektor perdagangan.

Berada di sekitar kawasan pesisir pantai, menjadikan wilayah Bandarharjo merupakan salah satu dari beberapa kawasan kumuh yang ada di Kota Semarang. Luas kawasan permukiman kumuh di Bandarharjo sekitar 4,26 hektar. Rekapitulasi luas permukiman kumuh di Kelurahan Bandarharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Luas Permukiman Kumuh Kelurahan Bandarharjo

RT/RW	LUAS (HA)
1 / III	0,21
1 / V	0,51
2 / III	0,26
3 / III	0,36
4 / III	0,53
6 / II	0,33
7 / II	0,20
8 / II	0,65
8 / III	0,31
8 / V	0,22
11 / II	0,23
12 / II	0,45

Sumber: Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023

Berikut ini adalah peta yang menunjukkan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bandarharjo secara spesifik.



Gambar 1. 3 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Bandarharjo

Sumber: Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023

Permukiman kumuh Kelurahan Bandarharjo berbatasan langsung dengan dua sungai utama, yaitu Kali Semarang di sebelah barat dan Kalibaru di sebelah selatan, yang mencakup RT 6/RW 2, RT 8/RW 3, RT 1/RW 3, RT 4/RW 3, dan RT 1/RW 5. Sungai tersebut cenderung stagnan, sehingga sering kali menimbulkan aroma tidak sedap di sekitar permukiman. Selain itu, berbagai masalah fisik dan lingkungan di permukiman kumuh Kelurahan Bandarharjo, seperti jalan-jalan yang

sering tergenang banjir, kesulitan akses air bersih, serta sistem drainase yang tidak optimal, semakin memperburuk kondisi wilayah ini. Dampak dari keberadaan permukiman kumuh ini berimbas pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai respons terhadap permasalahan permukiman kumuh, pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui program KOTAKU, yang difokuskan di daerah-daerah dengan tingkat kekumuhan signifikan, termasuk RW 1 hingga RW 8 di Kelurahan Bandarharjo (Anindita, N. P., Rostyaningsih, D., & Lestari, H., 2021).

Peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU Kelurahan Bandarharjo telah dilaksanakan, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Nila Putri Anindita pada tahun 2021 mengenai "Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara". Penelitian tersebut menjelaskan implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Meskipun tahap persiapan dan perencanaan program telah sesuai dengan tujuan, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal sebab tidak semua permukiman kumuh di Bandarharjo telah mendapat penanganan. Selain itu, keberlanjutan program, terutama dalam aspek pemanfaatan dan pemeliharaan, juga belum terwujud secara konsisten. (Anindita, N. P., Rostyaningsih, D., & Lestari, H., 2021).

Meskipun Program KOTAKU telah dilaksanakan di Bandarharjo, masih mengalami berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek *context*, di mana lokasi Kelurahan Bandarharjo

yang terletak di pesisir pantai menjadikannya sangat rentan terhadap banjir rob. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan program, karena seringkali genangan air akibat banjir rob merusak infrastruktur dan mempengaruhi kualitas permukiman di wilayah tersebut.

Genangan air laut yang sering terjadi, terutama saat pasang surut, merusak infrastruktur, termasuk jalan, bangunan rumah, dan tempat usaha. Kondisi ini tidak hanya memperburuk situasi kumuh di wilayah tersebut, tetapi juga menghambat efektivitas pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh (Anindita, N. P., Rostyaningsih, D., & Lestari, H., 2021). Akibatnya, permukiman di wilayah ini dianggap kurang nyaman untuk dihuni karena banyak bangunan memiliki luas yang berada di bawah standar. Di samping itu, banyak area di Bandarharjo yang rentan terhadap rob, yang menyebabkan kerusakan pada rumah dan infrastruktur lainnya, serta membuat banyak di antaranya tidak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang layak (Ameita P. & Marom A., 2021). Informasi lebih lanjut mengenai kondisi infrastruktur di Bandarharjo tersaji dalam laporan berita dibawah ini.



Gambar 1. 4 Kondisi Infrastruktur di Kelurahan Bandarharjo
Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dari Berbagai Artikel, 2024

Permasalahan banjir rob di Kelurahan Bandarharjo telah menimbulkan berbagai kerugian dan ketidaknyamanan bagi warga setempat. Fenomena ini terjadi ketika air laut pasang tinggi dan meluap ke daratan, mengakibatkan genangan air

yang merusak rumah dan infrastruktur serta mengganggu aktivitas sehari-hari. Warga di Kelurahan Bandarharjo sering merasa terganggu dan dirugikan akibat banjir rob yang berulang, terutama pada kondisi jalan yang memprihatinkan, di mana sejumlah truk dan mobil terjebak dalam lumpur akibat banjir. Kondisi jalan yang rusak menyebabkan banyak pengemudi kesulitan dalam melakukan aktivitasnya. Adanya banjir rob juga memperburuk kondisi infrastruktur jalan yang sudah terabaikan, seperti Jalan Bandarharjo Selatan, akibatnya mobilitas warga terhambat akibat kondisi jalan yang tidak rata dan berlubang. Saat musim hujan, Jalan Bandarharjo Selatan kerap tergenang air dan berlumpur, sedangkan di musim kemarau, debu yang menyebar mengganggu, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar jalan tersebut. (SindoNews.com, 2012).

Selain lokasinya yang berada di pesisir pantai, berbagai kendala juga muncul dalam pelaksanaan kebijakan penanganan permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo. Salah satu permasalahan yang terkait dengan aspek *input* adalah kurangnya dana atau anggaran yang memadai. Anindita (2021) menyoroti bahwa efisiensi penggunaan dana dalam program ini patut dipertanyakan, karena dana yang dialokasikan melalui Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) kurang mencukupi untuk menangani seluruh permasalahan kawasan kumuh, terutama akibat pengalihan anggaran yang diprioritaskan untuk penanggulangan COVID-19. Situasi ini menyebabkan sejumlah wilayah kumuh di Bandarharjo tidak dapat ditangani secara optimal. Alokasi dana yang terbatas sangat menghambat efisiensi program, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial seperti pengelolaan sampah dan sanitasi.

Pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, permasalahan juga muncul pada aspek *process* yaitu kendala yang dihadapi antara lain adalah ketidaksepahaman dengan masyarakat saat sosialisasi, khususnya terkait pembongkaran halaman rumah guna memeriksa sistem drainase yang disesuaikan dengan karakteristik tanah setempat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat utama infrastruktur drainase ini mengakibatkan keraguan terhadap pemerintah, yang berujung pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut (Purba, J., & Marom, A., 2021). Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran warga terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kesehatan berdampak negatif pada efisiensi pengelolaan sampah di Kelurahan Bandarharjo. Kendala lainnya adalah minimnya pemeliharaan sarana dan prasarana, di mana responsivitas terhadap pemeliharaan fasilitas sangat rendah karena pemeliharaan hanya dilakukan pada tahap awal pelaksanaan program (Anindita, 2021).

Hasil dari pelaksanaan program tersebut juga menjadi salah satu permasalahan yang ada, yang dapat dilihat dari aspek *product* yaitu kualitas infrastruktur juga tidak sesuai harapan, di mana penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai 100% (Anindita, 2021). Masalah ini diperparah oleh kurangnya sarana keamanan terhadap kebakaran dan akses air bersih yang belum tersebar merata di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan membangun tiga hunian vertikal yang menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir rob. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil, karena rumah susun justru menjadi salah satu titik

permukiman kumuh di wilayah Bandarharjo. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas masalah permukiman kumuh yang memerlukan penanganan lebih komprehensif dan berkelanjutan.



Gambar 1. 5 Kondisi Bangunan Rusunawa Bandarharjo
Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dari Berbagai Artikel, 2024

Kondisi rusunawa Bandarharjo menunjukkan bahwa bangunannya tidak terawat dengan keberadaan bangunan liar di sekitarnya yang semakin memperburuk lingkungan. Hal ini menciptakan suasana yang kumuh dan tidak tertata dengan baik. Menurut penelitian Rialdy Rendragraha dkk. (2017) berjudul "Redesain Rusunawa Bandarharjo Semarang", berbagai permasalahan ditemukan di Rusunawa Bandarharjo, mulai dari kerusakan bangunan, fasilitas yang tidak terawat, hingga ketidaktertiban dalam kepenghunan. Selain itu, beberapa aspek perancangan rusunawa tidak sesuai dengan kebutuhan penghuni, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam hunian.

Selain itu, terdapat permasalahan terkait minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) yang sering mengalami kelebihan kapasitas semakin memperburuk kondisi, sehingga menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan di kawasan tersebut.



Gambar 1. 6 Permasalahan Sampah di Kelurahan Bandarharjo
Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dari Artikel, 2024

Kondisi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kelurahan Bandarharjo menunjukkan bahwa warga mengeluhkan TPS yang sering “*overload*” dan mengeluarkan bau busuk yang sangat mengganggu. Situasi ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang tidak sehat tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penduduk setempat yang harus menghadapi bau menyengat setiap hari. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Semarang mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah adanya pembuang sampah dari daerah lain yang turut menyumbang volume sampah di TPS tersebut (Kompas.com, 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan evaluasi program lebih lanjut. Cronbach (1963) serta Stufflebeam (1971), sebagaimana dirujuk oleh Arikunto dan Jabar (2009:5), menyatakan bahwa evaluasi program merupakan langkah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan. Evaluasi ini memiliki peran krusial dalam menjamin pencapaian tujuan dan target dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh serta berperan dalam menghilangkan kawasan kumuh di Kota Semarang. Kegiatan evaluasi tentunya diperlukan dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, agar kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Bandarharjo dapat ditingkatkan secara efektif. Dalam penelitian ini, evaluasi dapat dilakukan menggunakan model evaluasi program menurut Stufflebeam (1995), yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*.

Penelitian bermaksud mengevaluasi hasil pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo dengan menilai kesesuaian program dengan strategi dan konsep yang dirancang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Dengan mempertimbangkan fokus utama evaluasi program, peneliti merumuskan judul **”Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Implementasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi, yaitu:

1. Terdapat infrastruktur yang kurang memadai seperti beberapa kondisi jalan masih mengalami kerusakan.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta keterbatasan fasilitas pembuangan yang memadai.
3. Alat pengaman kebakaran belum tersedia di seluruh wilayah Bandarharjo.
4. Pelaksanaan perbaikan selama masa pandemi COVID-19 mengalami kendala kekurangan dana akibat realokasi anggaran yang difokuskan pada penanganan pandemi.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah diidentifikasi, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang?

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dijabarkan di atas, manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi landasan akademik dalam pengembangan teori, khususnya dalam evaluasi program perbaikan permukiman kumuh, serta memberikan wawasan dan pemahaman bagi studi Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam ranah kebijakan publik.

- b. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi penelitian berikutnya, terutama dalam evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman, khususnya dalam mengevaluasi program perbaikan kualitas permukiman kumuh.
- b. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi terkini mengenai pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang.
- d. Bagi universitas, dapat dijadikan untuk bahan rujukan bagi pihak lainnya di masa depan.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
Dapit Saleh. Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi <i>Jurnal Inovasi Penelitian</i> , 2(5), 1557-1564. (2021)	Untuk mengevaluasi pelaksanaan program KOTAKU, mengidentifikasi hambatan yang muncul selama implementasi, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi untuk mengatasi hambatan tersebut.	Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik snowball sampling.	Teori William N. Dunn (2003:611): 1. Efektifitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan	Hasil evaluasi Program KOTAKU di Kota Sukabumi menunjukkan tantangan seperti kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran dan kepedulian yang belum memadai, serta perlunya peningkatan dalam upaya pelestarian lingkungan. Rekomendasi disarankan untuk meningkatkan efektivitas program dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.	Penelitian Dapit Saleh dan penelitian ini berbeda dalam fokus dan indikator yang digunakan. Penelitian Dapit Saleh mengevaluasi program KOTAKU di Kota Sukabumi dengan enam indikator dari William N. Dunn, serta membahas hambatan dan upaya pemerintah. Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context</i> , <i>input</i> , <i>process</i> , dan <i>product</i> .
Ahmad Hadi, Hafzana Bedasari, & Masrul Ikhsan.	Mengukur tingkat kemajuan yang telah dicapai	Metode penelitian studi pustaka.	Teori Howleat dan Ramesh dalam	Evaluasi pelaksanaan program KOTAKU di wilayah Kotalama Kota Pekanbaru menunjukkan	Perbedaan penelitian Ahmad Hadi, Hafzana Bedasari, dan Masrul Ikhsan dengan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru. <i>Jurnal Administrasi Politik dan Sosial</i> , 4(1), 43-49. (2023).	dan mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan program KOTAKU, sehingga dapat membantu mengarahkan langkah-langkah menuju pencapaian target untuk menghapuskan seluruh kawasan kumuh di Pekanbaru.		Nugroho (2012): 1. <i>Effort Evaluation</i> 2. <i>Performance Evaluation</i> 3. <i>Adequacy of Performance Evaluation</i> 4. <i>Effectiveness Evaluation</i> 5. <i>Process Evaluation</i>	bahwa tidak ada masalah serius yang ditemukan dalam lima indikator yang telah ditetapkan. Namun, tantangan yang masih terjadi adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pemantauan, padahal program ini menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat.	mereka membahas evaluasi administratif program Kota Tanpa Kumuh di Pekanbaru. Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context, input, process</i> , dan <i>product</i> .
Nila Putri Anindita, Dewi	Menganalisis implementasi	Metode penelitian	Teori Jan Merse (dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap	Perbedaan antara penelitian Nila Putri Anindita, Dewi

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
Rostyaningsih, & Hesti Lestari. Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku Di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara 85/Adm. Publik/2021 (Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Science). (2021).	kebijakan penanganan permukiman kumuh melalui Program KOTAKU serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat terhadap program tersebut di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara.	kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi tak berperan, wawancara dan dokumentasi serta kualitas data menggunakan teknik triangulasi.	Tahirm (2014:93): 1. Informasi 2. Isi Kebijakan 3. Dukungan Masyarakat 4. Pembagian Potensi	persiapan dan perencanaan program telah berjalan baik, namun tahap pelaksanaan belum efektif karena masih ada wilayah kumuh di Bandarharjo yang belum tertangani, dan tahap keberlanjutan belum berhasil karena pemanfaatan dan pemeliharaan belum berkelanjutan. Faktor pendukung program meliputi informasi, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi, sedangkan hambatannya adalah kebijakan yang belum sesuai tujuan dan pandemi Covid-19.	Rostyaningsih, dan Hesti Lestari dengan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian Nila dkk membahas implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo dengan menggunakan teori Jan Merse, yang meliputi informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context, input, process, dan product</i> .

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
Nafikri Aswar, & Ahmat Harahap. Evaluasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak. <i>JAPB</i> , 4(2), 844-858. (2021).	Untuk menilai efektivitas program KOTAKU dalam hal bagaimana jalan lingkungan dapat diakses dan drainase yang tersedia di lingkungan permukiman perumahan di RT. II dan RT. III.	Metode penelitian deskripsi kualitatif.	Teori Bridgman & Devis (2000): 1. <i>Input</i> 2. <i>Process</i> 3. <i>Output</i> 4. <i>Outcomes</i>	Evaluasi kebijakan program KOTAKU di Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, memperoleh nilai bobot 4 karena pelaksanaan program berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, diperlukan peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi dalam proses pengembangan dan perencanaan kegiatan pembangunan untuk menghindari kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan.	Perbedaan antara penelitian Nafikri Aswar dan Ahmat Harahap dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Nafikri dan Ahmat membahas evaluasi kebijakan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak dengan menggunakan teori Bridgman & Devis (2000), yang mencakup <i>Input</i> , <i>Process</i> , <i>Output</i> , dan <i>Outcomes</i> . Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context</i> , <i>input</i> , <i>process</i> , dan <i>product</i> .

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
Andi Dirga Yudhistira. Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan <i>Jurnal Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.</i> (2022).	Untuk mengevaluasi ulang program kota tanpa kumuh, dengan fokus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mungkin muncul serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Teori William N. Dunn (2003): 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Responsivitas 5. Ketepatan	Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat lima indikator yang menjadi acuan, yaitu efektivitas yang sesuai dengan waktu, kecukupan yang mencapai target program, efisiensi yang memenuhi sasaran, dan ketepatan yang sudah cukup baik. Namun, responsivitas masih perlu ditingkatkan karena dinilai kurang optimal.	Perbedaan antara penelitian Andi Dirga Yudhistira dan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Andi membahas evaluasi program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Somba Opu, mencakup pra pelaksanaan seperti tahap persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan, serta faktor penghambat dan upaya mengatasinya. Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context, input, process</i> , dan <i>product</i> .
Alfian Dwi Cahya, Andi Mulyadi, &	Menilai program City Without Slums	Metode pendekatan kualitatif	Teori William N. Dunn (2003):	Implementasi program kota tanpa kumuh di Kota Sukabumi belum mencapai	Perbedaan antara penelitian Alfian Dwi Cahya, Andi Mulyadi, dan Rizki Hegia Sampurna dengan

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
Rizki Hegia Sampurna. <i>Evaluation Program in Handling Cities without Slum Settlements (Kotaku) in Sukabumi City. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)</i> , 12(1), 1-8. (2023).	(KOTAKU) di Kota Sukabumi, dengan mempertimbangkan efektif, efisien, dan memadainya program ini dalam mengurangi permukiman kumuh. Studi ini juga menekankan pentingnya kebijakan publik yang sesuai dalam mengatasi masalah pemukiman kumuh dan meningkatkan	dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen.	1. <i>Effectiveness</i> 2. <i>Efficiency</i> 3. <i>Adequacy</i> 4. <i>Responsiveness</i> 5. <i>Alignment</i> 6. <i>Accuracy</i>	realisasi sempurna karena masih ada kawasan kumuh yang tersisa, meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik lingkungan berpengaruh besar terhadap kinerja program KOTAKU	penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Alfian dkk membahas evaluasi program Kota Tanpa Kumuh di Departemen Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Urusan Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi dengan menggunakan teori William N. Dunn. Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context, input, process</i> , dan <i>product</i> .

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
	kualitas hidup penduduk.				
Dyah Ayu Rahmawati, & Luben Gigih Dewa Nugraha. <i>Evaluation of the Use of the Electronic Based Public Complaints Application (Halomasbup) in Kediri Regency.</i> JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 8(2), 1199-1203. (2024).	Mengevaluasi penggunaan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis elektronik di Kabupaten Kediri.	Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data	Teori William N. Dunn (2003): 1. <i>Effectiveness</i> 2. <i>Efficiency</i> 3. <i>Adequacy</i> 4. <i>Responsiveness</i> 5. <i>Alignment</i> 6. <i>Accuracy</i>	Dalam implementasi aplikasi HALOMASBUP, bahwa penerapannya memberikan dampak positif dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, keselarasan, daya tanggap, dan akurasi pelayanan publik. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti potensi hambatan teknis, kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara menggunakan aplikasi, dan kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).	Perbedaan antara penelitian Dyah Ayu Rahmawati dan Luben Gigih Dewa Nugraha dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Dyah dan Luben membahas evaluasi aplikasi HALOMASBUP dengan menggunakan teori William N. Dunn. Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context, input, process, dan product</i> .
Yobi Stiawan, Andi Mulyadi,	Mengevaluasi Program Rehabilitasi	Metode penelitian kualitatif	Teori William N. Dunn (2004: 611):	Hasil penelitian menunjukkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Perbedaan antara penelitian Yobi Stiawan, Andi Mulyadi, dan Yana Fajar FY Basori dengan penelitian

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
& Yana Fajar FY Basori. <i>Evaluation Of The Social Rehabilitation Program For Unfitable Houses (Rs-Rtlh) In Cikembar District Sukabumi District.</i> DIA: Jurnal Administrasi Publik, 21(02), 317-328. (2023).	Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung program tersebut.	dengan pendekatan naratif	1. <i>Effectiveness</i> 2. <i>Efficiency</i> 3. <i>Adequacy</i> 4. <i>Alignment</i> 5. <i>Responsiveness</i> 6. <i>Accuracy</i>	(RTLH) di Kecamatan Cikembar oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi efektif. Program ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019. Masyarakat merasa puas, menunjukkan responsivitas dan ketepatan sasaran yang baik. Faktor penghambatnya adalah anggaran yang tidak mencukupi, kualitas bahan rendah, dan kurangnya gotong royong. Faktor pendukungnya adalah keterlibatan masyarakat, RT, RW, dan Kelurahan.	ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Yobi dkk membahas evaluasi rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Cikembar oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan teori Dunn, yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesesuaian, responsivitas, dan ketepatan, serta faktor penghambat dan pendukung. Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context, input, process, dan product</i> .

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
Karim Lasulika, Muh. Firyal Akbar, & Ramlah Alkatiri. <i>Policy Evaluation of Livable Houses Programs in Gorontalo City</i> . Journal of Public Representative and Society Provision, 1(1), 14-21. (2021).	Untuk mendapatkan gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo Periode 2016-2018.	Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Teori William N. Dunn (2003): 1. <i>Effectiveness</i> 2. <i>Efficiency and Adequacy</i> 3. <i>Equity</i> 4. <i>Responsiveness</i> 5. <i>Accuracy</i>	Bahwa evaluasi Program Rumah Layak Huni belum efektif. Hal ini terlihat dari kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dan pembangunan rumah layak huni yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari indikator pemerataan, program ini belum dilaksanakan secara merata. Ketepatan dalam melaksanakan kebijakan sudah dilakukan dengan baik namun belum maksimal, karena penerima program perumahan masih belum tepat sasaran.	Perbedaan antara penelitian Karim Lasulika, Muh. Firyal Akbar, dan Ramlah Alkatiri dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Karim dkk membahas evaluasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni di Gorontalo periode 2016-2018 dengan menggunakan lima indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context, input, process, dan product</i> .

Nama Pengarang, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian dan Teori	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
Made N. D. Andayana. <i>Evaluation of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Poverty Alleviation.</i> Integration: Journal Of Social Sciences And Culture, 1(2), 145-157. (2023).	Untuk mengetahui hasil pelaksanaan PKH tahun 2023 melalui evaluasi kebijakan pemerintah.	Metode penelitian kualitatif dengan teknik <i>purposive sampling</i> .	Teori William N. Dunn (2003): 1. <i>Effectiveness</i> 2. <i>Responsiveness</i> 3. <i>Efficiency</i> 4. <i>Adequacy</i> 5. <i>Precision</i>	PKH di Desa Lasiana telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Dilihat melalui efektivitas yang tercermin dari peserta yang mematuhi komitmen dan kewajiban mereka, penerimaan masyarakat terhadap program tersebut, efisiensi yang terlihat dari proses pencairan dana yang sudah berjalan lancar, kecukupan belum optimal karena bantuan yang diterima masyarakat terkadang habis sebelum waktunya; dan ketepatan yang tercapai karena penentuan peserta melalui banyak tahapan.	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Made N. D. Andayana terletak pada fokus kajiannya. Penelitian mereka membahas evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lasiana dengan menggunakan teori dari Dunn. Sementara itu, penelitian ini fokus pada evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kotaku di Kelurahan bandarharjo, Kota Semarang dengan merujuk pada lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 19 Tahun 2023, serta menggunakan indikator dari teori Stufflebeam (1995): <i>context, input, process</i> , dan <i>product</i> .

Sumber: Diolah oleh penulis

1.6.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) menyatakan administrasi publik merupakan langkah pengelolaan sumber daya dan tenaga kerja publik secara terkoordinasi untuk merumuskan, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan publik. Administrasi publik mencakup seni dan ilmu dalam mengelola urusan publik serta menjalankan berbagai fungsi yang telah ditetapkan. Sebagai bidang ilmu, administrasi publik berfokus pada penyelesaian permasalahan publik melalui optimalisasi organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan manajemen keuangan (Harbani Pasolong, 2017:8).

Nicholas Henry (1988:26) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan gabungan luas dan fleksibel antara teori dan praktik, dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang korelasi antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat pertanggungjawaban kebijakan publik terhadap beragam kebutuhan sosial, serta mengimplementasikan praktik manajerial yang optimal dan berdaya guna. Dalam perkembangannya, ilmu administrasi publik mengalami berbagai perubahan paradigma yang mencerminkan variasi dalam tujuan, teori, metodologi, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Nicholas Henry mengidentifikasi enam paradigma klasik administrasi publik yaitu:

1. *The Politics Administration Dichotomy (1900-1926)*

Tokoh utama paradigma pertama adalah Woodrow Wilson karyanya "*The Study of Administration*", Frank J. Goodnow karyanya "*Politics and Administration*", dan Leonard D. White karyanya "*Introduction to the Study of Public Administration*". Wilson menekankan pemisahan antara politik dan

administrasi. Goodnow dan White, menyatakan pemerintah memiliki dua fungsi berbeda yaitu politik, yang berfokus pada pembuatan kebijakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif, dan administratif berfokus pada pelaksanaan kebijakan tersebut oleh lembaga eksekutif. Paradigma pertama menekankan pada birokrasi pemerintahan sebagai lokus, sementara fokusnya belum terlalu jelas (Isnaini Rodiyah, Hendra Sukmana, Lailul Mursyidah, 2021:27).

2. *The Principles of Administration* (1927-1937)

Paradigma kedua ditandai dengan penerbitan buku “*Principles of Public Administration*” oleh Willoughby (1927), yang menyatakan bahwa administrasi negara memiliki prinsip-prinsip universal yang berlaku di berbagai cabang pemerintahan. Prinsip ini dianggap dapat diterapkan di berbagai konteks, terlepas dari budaya, fungsi, atau lingkungan institusional. Luther Gulick dan Lyndall Urwick dalam “*Papers on the Science of Administration*” menekankan pentingnya prinsip-prinsip administrasi sebagai ilmu, dengan fokus lebih pada penerapan prinsip-prinsip dibandingkan lokus. Salah satu prinsip terkenal adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*), yang menekankan bahwa prinsip-prinsip administrasi dapat diterapkan di berbagai organisasi, baik bisnis maupun pemerintahan, tanpa memperhatikan lokasi atau konteks tertentu.

3. *Public Administration as Political Science* (1950-1970)

Paradigma ketiga administrasi publik mendapat kritik tajam, seperti yang disampaikan oleh Herbert Simon. Kritik pertama menyatakan bahwa politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan, sementara kritik kedua menyoroti sifat

universal dan inkonsisten dari prinsip-prinsip administrasi. Akibatnya, administrasi publik kembali berlandaskan ilmu politik dengan fokus pada birokrasi pemerintahan. Meskipun paradigma ini meninjau ulang hubungan administrasi publik dan politik, penelitian yang dihasilkan terbatas pada keterampilan analitis. Pada era 1950-an, administrasi publik lebih dipandang sebagai bagian dari ilmu politik, dengan birokrasi sebagai ciri utamanya (Isnaini Rodiyah, Hendra Sukmana, Lailul Mursyidah, 2021:28).

4. *Public Administration as Administrative Science (1956-1970)*

Paradigma keempat muncul sebagai tanggapan terhadap kritik pada paradigma sebelumnya, di mana administrasi publik masih dianggap sebagai pionir dalam berbagai aspek teori politik, meskipun manajemen kebijakan kembali ke disiplin asalnya, khususnya teori politik. Tokoh-tokohnya yaitu Keith M. Anderson, James G. Walk, James G. Machh, Herbert Simon, Richard Cyert, dan James D. Thompson yang menekankan “ilmu manajerial”, yang menggunakan penelitian tentang hierarki dan ilmu eksekutif untuk memperluas kemampuan proyek secara spesifik. Hipotesis hierarkis menggunakan pengetahuan dari ilmu sosial, organisasi bisnis, dan administrasi publik untuk memahami perilaku otoritas di berbagai konteks. Pada 1960-an, organisasi menjadi bagian penting dari ilmu administrasi, namun perdebatan mengenai pemisahan administrasi publik dan sektor swasta terus berlanjut. Paradigma ini masih menghadapi tantangan dalam menentukan “lokus” administrasi publik, sehingga diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan lokus dan fokus secara komprehensif (Isnaini Rodiyah, Hendra Sukmana, Lailul Mursyidah, 2021:29).

5. *Public Administration as Public Administration (1971-Present)*

Paradigma kelima menegaskan perkembangan administrasi publik sebagai disiplin yang mandiri, terutama melalui teori organisasi, yang diperkenalkan oleh Herbert A. Simon pada 1947. Meskipun “ilmu administrasi murni” belum sepenuhnya terbentuk, teori ini terus berkembang dengan dukungan dari teknik-teknik terapan dalam ilmu manajemen. Di negara maju, administrasi publik mengalami sedikit guncangan dengan munculnya spesialisasi baru seperti *comparative public administration*, yang menyoroti kesamaan administrasi publik di negara berkembang. Paradigma ini juga meningkatkan keterlibatan akademisi dalam kebijakan ilmiah, ekonomi politik, dan analisis kebijakan. Nicholas Henry menekankan pentingnya teori organisasi dan ilmu manajemen dengan fokus pada isu-isu publik. (Beddy Iriawan Maksudi, 2017:262-263).

6. *Governance (1990-Present)*

Pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan menekankan peran pemerintah dan administrasi publik. Sejak akhir 1980-an, konsep ini berkembang dengan melibatkan pemimpin politik dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan institusional (Tamayao, 2014). Berbeda dengan pendekatan tradisional, tata kelola modern mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program (Ikeanyibe, 2016). Sebagai alternatif istilah “pemerintah”, tata kelola mencerminkan perubahan hubungan antara sektor publik dan sektor lainnya (Stoker, 1998). Meskipun pemerintah tetap memainkan peran sentral seperti dalam *New Public Management* (NPM), tata kelola mengakui peran

aktor non-pemerintah dan tidak hanya bergantung pada efisiensi sektor swasta (Wu & He, 2009). Model ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penyediaan layanan serta pengambilan keputusan (Ikeanyibe, 2016). Dengan pendekatan desentralisasi, tata kelola melibatkan berbagai unit, termasuk organisasi nirlaba dan perusahaan swasta, dalam pelayanan publik (Ewalt, 2001). Oleh karena itu, pentingnya kerja sama antara masyarakat, organisasi, dan sektor publik sangat ditekankan dalam tata kelola yang efektif (Gibson, 2011, hal. 4).

Berdasarkan perspektif para ahli, administrasi publik merupakan langkah kerja sama yang sistematis dan terstruktur oleh aparat pemerintahan, dengan sumber daya serta personel publik diatur dan dikelola guna melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan negara serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Esensi utama dari administrasi publik adalah mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian ini, teori administrasi publik menjadi dasar dalam memahami berbagai aspek kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo menjadi fokus utama kajian ini, yang sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi publik dalam menilai efektivitas program serta dampaknya terhadap perbaikan kondisi permukiman kumuh.

Penelitian ini mengadopsi paradigma keenam dalam administrasi publik, yaitu *governance*, yang mengutamakan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang efektif. Paradigma ini

dipilih karena berfokus pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta pelaksanaan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Studi ini bertujuan mengevaluasi implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, guna menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kawasan permukiman kumuh. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta hambatan dalam pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan program di masa mendatang.

1.6.3 Kebijakan Publik

Kebijakan memiliki makna luas dan spesifik. Umumnya, kebijakan mencakup serangkaian tindakan yang memberikan arah dan kesinambungan. Greer dan Hoggett (1999) mendefinisikan kebijakan yaitu rangkaian tindakan yang melampaui keputusan individual. Secara lebih spesifik, kebijakan mencerminkan hubungan antara cara dan tujuan. Ranson dan Steward dalam Greer dan Hoggett (1999) menegaskan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh lingkup publik yang berperan dalam menetapkan, menyatakan, dan mewujudkan tujuan bersama. Sementara itu, Post et al. (1999) mendeskripsikan kebijakan sebagai rencana tindakan pemerintah yang bertujuan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Ketika istilah kebijakan dan publik digabungkan, maknanya menjadi luas dan kompleks. Kebijakan publik merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan yang tidak dapat diacuhkan. Suatu negara dapat dianggap gagal jika

tidak memiliki kebijakan publik, karena tanpa itu, kehidupan bersama hanya dikendalikan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi bertindak otoriter demi kepentingan pribadi atau golongan mereka (Nugroho, 2009:11). Dye (2002:1) menjelaskan bahwa kebijakan publik mencakup segala tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut, Anderson (2000) dalam bukunya *Public Policy Making* menegaskan bahwa kebijakan publik mencerminkan keputusan pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan maupun yang tidak dilakukan.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Anderson (dalam Hill dan Hupe, 2002), yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat dan lembaga pemerintahan. Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2007) sejalan dengan Dye dan Anderson, dengan menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup segala tindakan atau ketidaktindakan pemerintah, yang mencerminkan tujuan dan maksud dari berbagai program pemerintah. Dye dan Anderson juga menekankan bahwa kebijakan publik tidak sekadar menghasilkan keputusan yang bersifat terpisah, melainkan mencakup rangkaian aktivitas yang saling berkaitan. Richard Rose memperkuat pandangan ini dengan mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang saling berhubungan (Anderson, 2000). Pemikiran tersebut selaras dengan Carl J. Friedrich, yang menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang menghadirkan tantangan serta peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mengatasi masalah, Thomas R. Dye (2001) membagi pembuatan kebijakan menjadi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu identifikasi masalah kebijakan, pengaturan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Parson, 2005: 154)

- 1. Identifikasi Masalah Kebijakan.** Tahap awal dalam penyusunan kebijakan adalah identifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Permasalahan publik dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan di kalangan sekelompok individu, sehingga memerlukan perhatian serta solusi untuk memperbaikannya (Winarno, 2007). Isu publik sebagai ketidakpuasan terhadap kebutuhan, nilai, atau peluang yang diinginkan oleh masyarakat, yang hanya dapat dipenuhi melalui kebijakan pemerintah (Subarsono 2005).
- 2. Pengaturan Agenda.** Setelah identifikasi masalah kebijakan, langkah berikutnya adalah menempatkan masalah tersebut dalam agenda publik. Pada tahap ini, masalah yang telah diidentifikasi bersaing untuk mendapat perhatian. Tidak semua permasalahan dapat menjadi bagian dari agenda kebijakan. Hanya isu-isu tertentu yang dianggap memiliki urgensi dan relevansi tinggi oleh para pembuat kebijakan yang akan diprioritaskan untuk dibahas dan diselesaikan.
- 3. Perumusan Kebijakan.** Perumusan kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, di mana pembuat kebijakan menentukan pilihan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul. Proses ini mencakup negosiasi serta upaya

menyeimbangkan berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Pada tahap ini, beragam alternatif kebijakan disusun dan dianalisis sebelum akhirnya dipilih sebagai dasar penetapan kebijakan akhir (Sidney, 2007:79).

- 4. Pengesahan Kebijakan.** Pengesahan kebijakan merupakan tahap krusial yang melibatkan penyesuaian serta penerimaan terhadap prinsip yang telah disepakati dan standar yang berlaku (Widodo, 2007). Pada tahap ini, kebijakan yang dirumuskan disetujui dan disahkan oleh pihak berwenang agar dapat diimplementasikan. Pengesahan kebijakan memastikan bahwa kebijakan tersebut telah melalui evaluasi yang matang sebelum diterapkan.
- 5. Pelaksanaan Kebijakan.** Merupakan langkah yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Jika tidak diimplementasikan, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai solusi harus dijalankan oleh instansi administratif dan agen pemerintah di tingkat operasional, dengan dukungan sumber daya manusia serta finansial yang memadai.
- 6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*).** Merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Pada tahap inilah, kebijakan yang telah diterapkan dievaluasi untuk menilai efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga perlu ditetapkan indikator atau kriteria yang jelas guna mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memberikan dampak yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan tahap *policy evaluation* dengan fokus pada evaluasi kebijakan publik yang terkait dengan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU. Evaluasi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pencapaian serta kendala dalam pelaksanaan program KOTAKU. Selain itu, hasil evaluasi ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program di masa mendatang.

1.6.4 Evaluasi

Stufflebeam dan Shinkfield (1985) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar dalam menilai nilai serta manfaat suatu program, baik dari segi pencapaian tujuan, perencanaan, implementasi, maupun dampaknya. Sementara itu, Stark & Thomas (1994) mendefinisikan evaluasi sebagai proses sistematis yang mencakup pemilihan, pengumpulan, analisis, serta penyusunan keputusan untuk program selanjutnya. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan guna mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, serta menyajikan informasi terkait suatu program. Informasi yang diperoleh dari evaluasi menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, serta perencanaan program di masa mendatang (Widoyoko, 2012:6).

Griffin dan Nix (1991) menyatakan terdapat hierarki dalam proses pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran dilakukan terlebih dahulu untuk membandingkan hasil observasi dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penilaian dilakukan dengan tujuan menginterpretasikan serta mendeskripsikan hasil

pengukuran. Evaluasi menjadi tahap akhir, di mana proses ini bertujuan untuk menentukan nilai atau dampak dari suatu perilaku atau fenomena yang diamati. Menurut Mulyatiningsih (2011), evaluasi menggunakan pendekatan CIP (*Context, Input, Process*) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program. Dalam pendekatan ini, konteks membantu memahami latar belakang yang melatarbelakangi perlunya suatu perubahan. Input digunakan untuk menilai serta mengidentifikasi kapasitas sumber daya yang tersedia, seperti bahan, alat, tenaga kerja, dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, proses bertujuan untuk mengidentifikasi serta memprediksi berbagai hambatan yang berpotensi muncul selama implementasi program.

Berdasarkan pandangan para ahli, evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian yang mencakup analisis mendalam terhadap substansi suatu kegiatan guna memperoleh hasil akhir yang terukur. Evaluasi juga berperan dalam menyajikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Secara teoritis, evaluasi merupakan suatu pertimbangan yang dilakukan melalui analisis dan pengukuran untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Fungsi utama evaluasi adalah sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas atau efektivitas suatu kebijakan atau program berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya mengkaji efektivitas dan dampak suatu kebijakan, tetapi juga memberikan wawasan penting untuk perbaikan berkelanjutan serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

1.6.4.1 Evaluasi Program

Suharsimi Arikunto (2004:2), program memiliki dua pengertian, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, program didefinisikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Sedangkan, dalam pengertian khusus, program berhubungan dengan evaluasi, yakni serangkaian kegiatan yang merupakan implementasi atau pelaksanaan dari suatu kebijakan, yang berjalan secara berkesinambungan dalam suatu organisasi dan melibatkan sejumlah orang. Dalam pengertian khusus ini, program terdiri dari serangkaian kegiatan yang membentuk sebuah sistem, dengan durasi pelaksanaan yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Di sisi lain, Isaac dan Michael (1984:6) mengemukakan bahwa setiap program harus diakhiri dengan evaluasi, yang penting untuk menilai apakah program tersebut telah berhasil melaksanakan fungsinya seperti yang telah ditetapkan. Mereka menjelaskan bahwa ada 3 tahap dalam proses evaluasi program, yaitu:

1. Merumuskan pertanyaan dan menentukan informasi yang ingin diperoleh;
2. Mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, dan
3. Menyediakan informasi kepada pengambil keputusan untuk menentukan apakah program tersebut akan dilanjutkan, diperbaiki/dihentikan.

Evaluasi program adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian program melalui pengumpulan dan analisis data menggunakan metode yang terencana (Suharsimi Arikunto, 2009). Tyler (dalam Arikunto dan Jabar, 2009) menyatakan bahwa evaluasi digunakan untuk mengukur

tercapainya tujuan pendidikan. Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) juga menekankan bahwa evaluasi bertujuan memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Menurut Pedoman Evaluasi Ditjen PLS Depdiknas (2002), evaluasi program melibatkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mengukur keberhasilan program berdasarkan tolok ukur yang telah ditentukan, guna menilai efektivitas dan kesesuaian program dengan tujuan yang ditetapkan.

Dari pendapat ahli tersebut, bahwa evaluasi program melibatkan serangkaian kegiatan pengumpulan data atau informasi ilmiah yang hasilnya digunakan sebagai landasan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan program ke depannya. Evaluasi mencakup sebagian atau seluruh elemen implementasi program untuk menilai seberapa sukses program dalam mewujudkan tujuannya. Tanpa evaluasi, sulit untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai. Keberhasilan program dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, menunjukkan seluruh proses program merupakan sistem yang memerlukan pendekatan sistemik dan pola pikir terstruktur dalam pelaksanaan evaluasinya.

1.6.4.2 Tujuan Evaluasi Program

Setiawan (1999:20) mengungkapkan bahwa maksud dari evaluasi program ialah untuk menjamin apakah perolehan hasil, perkembangan, serta hambatan yang muncul dalam implementasi program dapat dikaji dan dievaluasi, sehingga dapat dimanfaatkan guna meningkatkan pelaksanaan program di waktu mendatang. Sementara itu, Mulyatiningsih (2011:114) menjelaskan bahwa evaluasi program dilakukan dengan beberapa tujuan utama.

1. Menyajikan peran program dalam mencapai tujuan organisasi serta mendukung pengembangan program sejenis.
2. Memfasilitasi pengambilan keputusan terkait kelangsungan program, apakah akan dilanjutkan, disempurnakan, atau dihentikan.

Sudjana (2006:48) menyatakan terdapat 6 tujuan dari evaluasi program:

1. Evaluasi bertujuan untuk memberikan masukan dalam perencanaan program agar lebih terarah dan efektif.
2. Evaluasi menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam menentukan langkah lanjutan, seperti pengembangan, perluasan, atau penghentian program.
3. Evaluasi menghasilkan rekomendasi terkait perubahan atau penyempurnaan program yang sedang berjalan.
4. Evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung serta menghalangi keberhasilan program.
5. Evaluasi memberikan saran mengenai strategi motivasi dan pembinaan, termasuk aspek pengawasan, supervisi, serta monitoring bagi pihak penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program.
6. Evaluasi menyajikan data sebagai dasar keilmuan yang mendukung proses evaluasi program secara lebih sistematis dan berbasis bukti.

Mengacu pada pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk memahami kondisi serta mengevaluasi efektivitas program tersebut. Evaluasi ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan apakah program tersebut layak dilanjutkan dan dikembangkan di tempat lain, diperbaiki

terlebih dahulu, atau dihentikan jika tidak efektif. Setiap program perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai pencapaiannya. Tanpa evaluasi, efektivitas program tidak dapat diukur secara objektif. Data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi kemudian menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan kelanjutan, perbaikan, atau penghentian program tersebut.

1.6.4.3 Model Evaluasi Program

Model evaluasi adalah desain yang dirancang oleh ahli dan diakui sebagai standar evaluasi. Evaluasi juga diklasifikasikan berdasarkan misi dan kepentingan tertentu, yang dikenal sebagai pendekatan. Tujuan utama model evaluasi adalah mengumpulkan data atau informasi tentang objek yang dievaluasi, yang kemudian disampaikan kepada pengambil keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait program yang dievaluasi. Berbagai model yang sering digunakan dalam evaluasi program antara lain:

1. ***Goal Oriented Evaluation Model*** dikembangkan oleh Tyler. Dalam model ini, evaluator memantau secara berkelanjutan pencapaian tujuan program. Evaluasi dilakukan dengan menilai kemajuan peserta program serta efektivitas hasil yang telah dicapai. Salah satu bentuk dari model ini adalah *discrepancy model* yang dikembangkan oleh Provus, yang berfokus pada identifikasi kesenjangan *discrepancy* dalam setiap komponen program. Evaluator membandingkan antara tujuan yang seharusnya dicapai dengan hasil nyata yang telah terealisasi untuk mengetahui di mana terjadi perbedaan dan bagaimana cara memperbaikinya.

2. ***Countenance Evaluation Model*** adalah model yang dikembangkan oleh Stake dan Fernandes. Model ini menekankan dua elemen utama, yaitu *description* dan *judgement*. Dalam evaluasi program, model ini terbagi tiga tahapan: *anteseden*, yang merujuk pada konteks; *transaksi*, yang mengacu pada proses; dan *keluaran*, yang mencakup output dan outcome, atau hasil dari program tersebut. (Suharsimi Arikunto, 2009).
3. ***Kirkpatrick's Evaluation Model*** dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick dan diperbarui tahun 1998 dalam bukunya "*Evaluating Training Programs: The Four Levels*". Model ini diterapkan untuk menilai program pelatihan dan mencakup empat tingkatan evaluasi, yaitu: *Reaksi*, mengukur respons peserta terhadap pelatihan; *Belajar*, mengevaluasi seberapa besar peserta mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan; *Perilaku*, menilai perubahan perilaku peserta di lingkungan kerja sebagai hasil dari proses pelatihan; dan *Hasil*, mengevaluasi dampak akhir dari pelatihan terhadap organisasi, seperti peningkatan kinerja dan produktivitas. Model ini menyediakan kerangka kerja sistematis untuk menilai efektivitas program pelatihan dari berbagai aspek.
4. ***CSE-UCLA Evaluation Model*** adalah model evaluasi yang berasal dari *Center for the Study of Evaluation* (CSE) di University of California, Los Angeles (UCLA). Model ini memiliki lima tahapan evaluasi utama, terdiri dari perencanaan, pengembangan, penerapan, hasil, dan dampak. Menurut Fernandes (1984), model CSE-UCLA dapat dibagi menjadi empat tahapan evaluasi: penilaian kebutuhan, perencanaan program, evaluasi formatif, dan

evaluasi sumatif. Secara prinsip, tahapan yang diusulkan oleh Fernandes sejalan dengan model CSE-UCLA. Pada tahap perencanaan dan pengembangan program, dilakukan penilaian kebutuhan, pada tahap pelaksanaan, evaluasi formatif dibutuhkan, sementara evaluasi sumatif digunakan untuk menilai hasil dan dampak program.

5. ***Discrepancy Evaluation Model***, yang dikembangkan Malcolm Provus pada tahun 1966, adalah model evaluasi yang fokus pada identifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan program. Model ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perbedaan antara tujuan yang ingin dicapai dan hasil yang sebenarnya tercapai. Evaluator dalam model ini menilai perbedaan (kesenjangan) antara tujuan program yang telah ditetapkan dengan hasil yang terealisasi dalam praktiknya. Dalam konteks program, seperti di lembaga pendidikan, model Discrepancy mencakup lima aspek utama untuk dievaluasi, yaitu:

- 1) *Design*, mencakup desain kegiatan atau program kerja, di mana evaluasi difokuskan pada keberadaan unsur input, proses, dan output dalam rancangan program yang ditetapkan.
- 2) *Installation*, berkaitan dengan penyediaan perangkat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program; evaluator menilai ketepatan sumber daya dan perlengkapan yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program.
- 3) *Process*, melibatkan pelaksanaan program, termasuk kepemimpinan dan penugasan, dengan fokus evaluasi pada hubungan antara hal-hal yang ingin diubah, dibangun, atau dikembangkan.

- 4) *Product*, evaluasi menilai efektivitas desain program, dengan penekanan pada pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan.
- 5) *Cost*, mencakup implikasi sosial, politik, dan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dari pelaksanaan program.

6. ***CIPP Evaluation Model*** merupakan metode yang banyak digunakan oleh para evaluator dalam melakukan evaluasi. Menurut Stufflebeam (1995), tujuan utama dari model ini adalah untuk perbaikan, bukan sekadar pembuktian. Dalam pandangannya, "tujuan evaluasi yang paling penting adalah untuk meningkatkan, bukan untuk membuktikan." Model ini terdiri dari empat dimensi utama, yakni konteks, input, proses, dan produk, yang masing-masing berfokus pada elemen-elemen serta proses yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program. Evaluasi dengan menggunakan model CIPP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan.

- 1) Evaluasi Konteks. Menurut Sax (1980), evaluasi konteks adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan tujuan dan mendefinisikan lingkungan yang relevan. Stufflebeam dan Shinkfield (1985) juga menyatakan bahwa evaluasi konteks bertujuan untuk menilai status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mendiagnosis masalah, serta memberikan solusi. Evaluasi ini juga berfokus pada pengecekan apakah tujuan dan prioritas yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.

- 2) Evaluasi Input. Stufflebeam dan Shinkfield (1985:173) menjelaskan bahwa evaluasi input berfokus pada penentuan cara untuk mencapai tujuan program. Evaluasi ini membantu dalam pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, serta merencanakan alternatif, strategi, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen utama dalam evaluasi input mencakup sumber daya manusia, sarana dan peralatan, dana atau anggaran, serta berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.
- 3) Evaluasi Proses. Stufflebeam dan Shinkfield (1985) menjelaskan bahwa evaluasi proses bertujuan untuk memeriksa pelaksanaan suatu rencana atau program. Evaluasi ini memberikan umpan balik kepada manajer dan staf mengenai sejauh mana aktivitas program berjalan sesuai dengan rencana, serta apakah sumber daya digunakan secara efisien. Evaluasi proses juga membantu dalam memodifikasi rencana agar lebih sesuai dengan kebutuhan serta menilai sejauh mana keterlibatan dalam aktivitas program dapat melaksanakan peran atau tugas yang diberikan.
- 4) Evaluasi Produk. Stufflebeam dan Shinkfield (1985) menyatakan bahwa tujuan evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menentukan pencapaian hasil dari suatu program. Evaluasi produk juga mengevaluasi sejauh mana program tersebut dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang dilayani. Sax (1980) menambahkan bahwa fungsi evaluasi produk adalah membantu

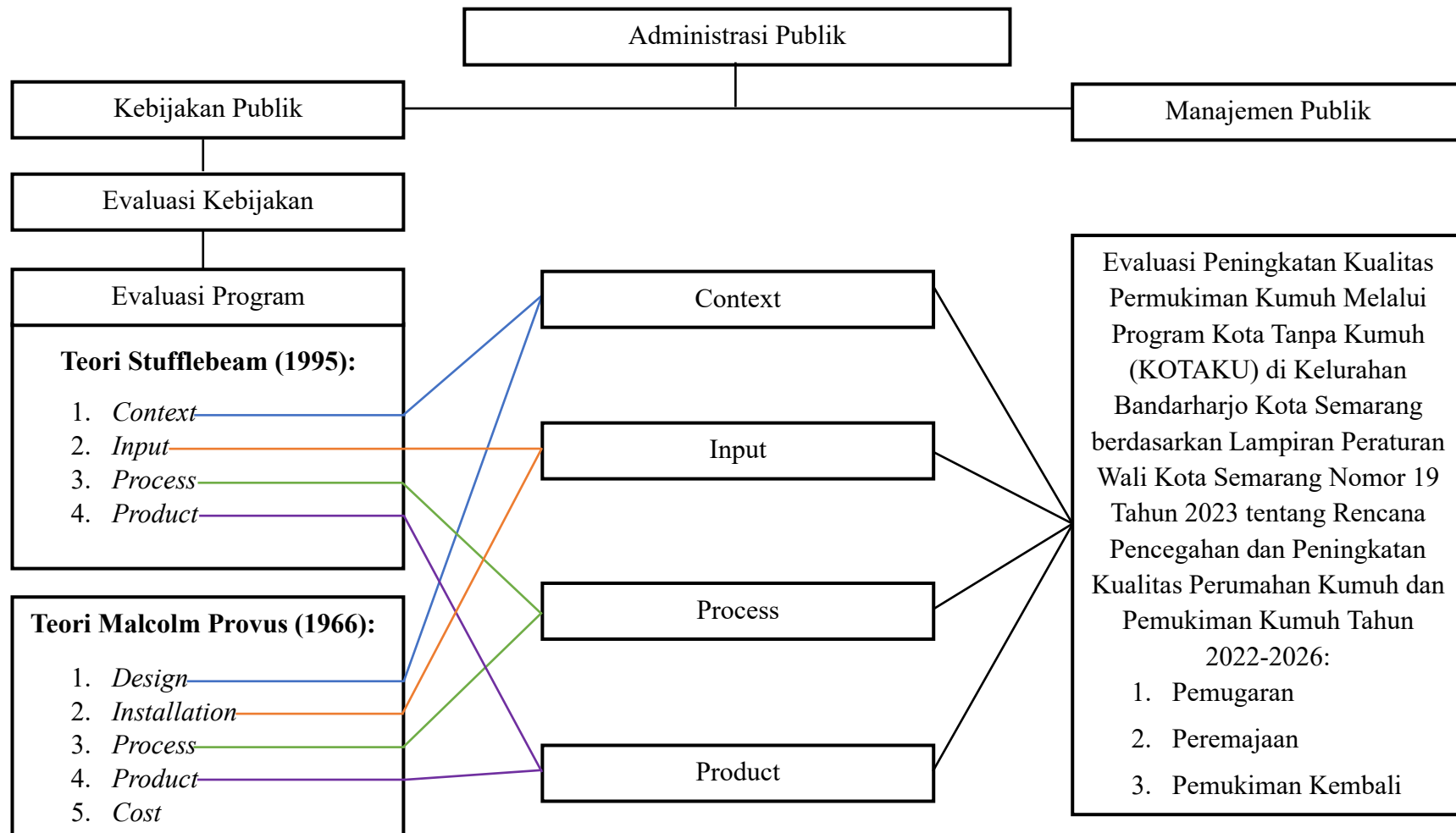
pengambilan keputusan terkait kelanjutan, penghentian, atau modifikasi program, serta menilai hasil yang telah dicapai dan langkah-langkah yang perlu diambil setelah program berjalan.

Dalam penelitian ini, model evaluasi yang diterapkan adalah CIPP Evaluation Model (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Pemilihan model ini karena relevan dalam menilai efektivitas Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang. Melalui pendekatan CIPP, penelitian ini akan menyajikan analisis menyeluruh mengenai konteks, sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU. Selain itu, model ini juga memungkinkan perumusan rekomendasi untuk perbaikan serta keberlanjutan program di masa depan.

1.7 Kerangka Berpikir Teoritis

Berikut ini adalah kerangka berpikir yang mengacu pada tujuan dan teori yang dapat ditampilkan dalam gambar dibawah.

Gambar 1. 7 Kerangka Pikir Teoristis



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui program KOTAKU, bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kawasan kumuh di perkotaan dengan meliputi pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali yaitu:

- 1. Pemugaran,** adalah rencana perbaikan bangunan dan infrastruktur tanpa mengubah struktur utama, yang diimplementasikan melalui rehabilitasi fisik dan peningkatan fasilitas umum. Gejala pemugaran meliputi:
 - 1) Jalan Lingkungan.
 - 2) Drainase Lingkungan.
 - 3) Sarana dan Prasarana Persampahan (PSP).
- 2. Peremajaan,** adalah rencana penataan kembali permukiman kumuh melalui pembaruan fisik, sosial, dan ekonomi, yang diimplementasikan dengan pembongkaran bangunan tidak layak, pembangunan kembali, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gejala peremajaan meliputi:
 - 1) Sarana Permukiman (RTH dan MCK Umum).
 - 2) Sistem Sanitasi
 - 3) Air Bersih/Minum.
 - 4) Penanganan Kebakaran.
- 3. Pemukiman Kembali,** adalah rencana strategi relokasi penduduk ke lokasi yang lebih layak, yang diimplementasikan melalui penyediaan hunian,

pembangunan infrastruktur, dan pendampingan sosial-ekonomi. Gejala pemukiman kembali meliputi:

- 1) Bangunan Gedung.

1.8.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang

Faktor pendukung dan faktor penghambat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dua jenis faktor yang memengaruhi suatu situasi atau proses. Dalam evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, terdapat beberapa aspek yaitu:

1. **Context** (Konteks) adalah komponen yang menilai lingkungan, kebutuhan, dan tujuan yang mendasari program atau proyek yang dievaluasi. Gejala *context* mencakup:

- 1) Sasaran Program.
- 2) Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat.

2. **Input** (Masukan) adalah komponen yang mengevaluasi sumber daya, strategi, dan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan program. Gejala *input* mencakup:

- 1) Dukungan Pemerintah.
- 2) Anggaran.
- 3) Durasi Waktu Pelaksanaan Program.
- 4) Akses Informasi.

3. **Process** (Proses) adalah komponen yang memantau pelaksanaan program, memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Gejala *process* mencakup:

- 1) Kualitas Infrastruktur.
- 2) Kapasitas dan Kelembagaan (SDM).

4. **Product** (Produk) adalah komponen yang menilai hasil akhir dari program, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, untuk menentukan efektivitas dan dampaknya. Gejala *product* mencakup:

- 1) Peningkatan Akses Layanan Dasar.

1.9 Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau langkah, sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Dalam konteks ilmiah, metode mengacu pada cara untuk memahami suatu objek studi, sementara metodologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai metode kerja. Penelitian sendiri adalah proses sistematis yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara objektif guna menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum. Metodologi penelitian merujuk pada pendekatan ilmiah yang terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk memperoleh wawasan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan informasi yang valid melalui pencarian, pengembangan, dan validasi tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2015:15) penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan

filsafat *postpositivisme* dan bertujuan untuk mengkaji objek penelitian dalam kondisi alaminya, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling*, menggunakan pendekatan triangulasi, serta dianalisis secara induktif. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada makna dibandingkan generalisasi dan berkembang sebagai respons terhadap perubahan paradigma dalam memahami realitas, fenomena, atau gejala tertentu.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang. Peneliti juga menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat program dengan menggunakan teori Stufflebeam (1995) yang meliputi *context*, *input*, *process*, dan *product* untuk mengevaluasi sejauh mana program KOTAKU telah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas program di masa depan.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada wilayah di mana penelitian dilakukan. Wilayah penelitian menjadi sumber penting untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan permasalahan dan sasaran penelitian. (Sugiyono, 2015:13). Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bandarharjo, khususnya di RW 2, RW 3, dan RW 5 pada beberapa RT terkait, yang dipilih sebagai situs penelitian berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 tentang Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Semarang. Lokasi tersebut merupakan lokasi permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Bandarharjo. Peneliti

menemukan permasalahan atau fenomena yang relevan dengan topik penelitian, yang didukung oleh data lapangan yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan pengamatan.

1.9.3 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 4 Fenomena Penelitian

No	Konsep	Fenomena	Gejala
1.	Peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai penanganan dan pengembangan kawasan prioritas di Kota Semarang untuk mewujudkan kota bebas dari kawasan kumuh dalam skala kota.	Peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU.	
		1.1 Pemugaran	1. Jalan Lingkungan
			2. Drainase Lingkungan
			3. Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP)
		1.2 Peremajaan	1. Sarana Permukiman (RTH dan MCK Umum)
			2. Sistem Sanitasi
			3. Air Bersih/Minum
			4. Pengamanan Kebakaran
		1.3 Pemukiman Kembali	1. Bangunan Gedung
2.	Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU merupakan point penting dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh.	Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU.	
		2.1 Context	1. Sasaran Program
			2. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
		2.2 Input	1. Dukungan Pemerintah
			2. Anggaran
			3. Durasi Waktu Pelaksanaan Program
			4. Akses Informasi
		2.3 Process	1. Kualitas Infrastruktur
			2. Kapasitas dan Kelembagaan (SDM)
		2.4 Product	1. Peningkatan Akses Layanan Dasar

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.9.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dikenal sebagai informan atau narasumber adalah individu yang memberikan informasi dan data terkait topik yang sedang diteliti. Subjek penelitian dipilih berdasarkan pemahaman mendalam mengenai kondisi, lokasi, dan isu yang dikaji. Informan utama adalah individu yang memiliki pengetahuan teknis atau keahlian terkait masalah penelitian dan mampu memberikan wawasan rinci mengenai aspek teknis tertentu. Informan pendukung adalah orang-orang yang menyediakan informasi tambahan untuk melengkapi analisis dan pembahasan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:85). Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Narasumber yang dipilih diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang diteliti serta terlibat aktif dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang. Hasil wawancara, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi, akan disajikan dalam bentuk narasi. Berikut adalah narasumber yang menjadi subjek penelitian:

Tabel 1. 5 Subjek Penelitian

No	Status	Teknik Pemilihan	Jumlah	Presentase	Total
1.	Staff Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bidang RURS	<i>Purposive</i>	1	20%	1
2.	Anggota Unit Pengelola Lingkungan (UPL) Badan Kewasdayaan Masyarakat (BKM) Bandarharjo.	<i>Snowball</i>	3	20%	1

3.	Bendahara Badan Kewasdayaan Masyarakat (BKM) Bandarharjo.	<i>Purposive</i>	1	20%	1
4.	Penerima Manfaat Program KOTAKU Kelurahan Bandarharjo.	<i>Snowball</i>	22	20%	6
Total					9

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.9.5 Jenis Data

Pada umumnya, data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam analisis ini, fokus utama adalah pada data kualitatif.

1. Data Kuantitatif merujuk pada data yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini dapat diolah menggunakan rumus matematika atau dianalisis dengan metode statistik.
2. Data Kualitatif terdiri dari kata-kata atau informasi verbal yang diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini lebih mengutamakan data kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk mengamati dan menganalisis secara mendalam berbagai fenomena permasalahan. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

1.9.6 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji fenomena secara mendalam. Data atau informasi yang disajikan didominasi oleh tulisan atau sekumpulan kata yang menggambarkan fenomena serta memberikan informasi yang mendalam. Data tersebut diinterpretasikan untuk memahami konteks yang lebih luas dan pola yang mungkin tidak terlihat dalam data kuantitatif. Selain narasi, data ini juga dipadukan dengan tabel dan grafik untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta mendukung analisis yang dilakukan.

Menurut Sugiyono (2015:62), sumber data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung untuk memahami kondisi lapangan secara lebih jelas. Dokumentasi berupa gambar, catatan, dan rekaman wawancara juga menjadi bagian dari data primer yang dikumpulkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang tersedia tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Data ini dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan oleh peneliti untuk mendukung dan memperkuat analisis. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, artikel, internet, serta data resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi terkait. Sumber data sekunder mencakup publikasi BPS Jawa Tengah dan Kota Semarang, data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, website Pemerintah Kota Semarang, website Simantou Kementerian PUPR. Selain itu, diperoleh melalui media sosial, seperti *Instagram @disperkimkotasemarang* dan *@kotaku_kotasemarang*.

Penggunaan data sekunder membantu memperluas perspektif, memperdalam analisis, dan memvalidasi temuan dari data primer.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah krusial dalam penelitian, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. (Moleong, 2001:186). Dalam penelitian di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memahami dan terlibat dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara untuk memperoleh data yang relevan.

2. Observasi

Selain wawancara, penelitian kualitatif juga mengumpulkan data melalui observasi. Menurut Nawawi & Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap unsur-unsur dalam suatu gejala atau objek penelitian. Observasi dilakukan untuk memahami konteks wawancara dan memastikan hasilnya lebih akurat. Peneliti mengamati secara langsung kegiatan atau peristiwa yang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini,

peneliti melakukan observasi langsung di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, menggunakan metode observasi terbuka, di mana subjek penelitian menyadari bahwa aktivitas mereka sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan harian, dan sebagainya yang memuat informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini, data dikumpulkan dengan mengulas literatur dan mengabadikan dalam bentuk gambar yang relevan dengan topik, sebagai pelengkap penelitian kualitatif.

4. Studi Kepustakaan

Selain observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari artikel jurnal penelitian, buku, dan dokumen relevan guna membangun landasan teori serta memahami konteks penelitian. Studi kepustakaan membantu memahami konteks teoretis dan historis dari topik penelitian serta mengidentifikasi celah penelitian yang ada. Literatur yang relevan membantu peneliti dalam mengembangkan kerangka konseptual dan metodologis, serta memperkaya analisis data dari observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara untuk mengamati pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah program tersebut telah berjalan

sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang mendukung dan menghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

1.9.8 Analisis dan Interpensi Data

Menurut Sugiono (2015:243), teknik analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi melalui observasi di lapangan, wawancara, dan sumber data lainnya yang dapat dipahami dengan mudah serta dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Tiga jenis aktivitas yang dilakukan secara bersamaan dalam membentuk analisis ini, yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta bahan empiris lainnya untuk memperkuat informasi yang mendukung analisis mendalam. (Miles, Huberman, & Saldana, 2015). Data kualitatif dapat disusun melalui seleksi, ringkasan, atau parafrase. Tujuan kondensasi data adalah menyederhanakan informasi agar analisis terhadap Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang dapat dilakukan secara mendalam. Informasi diperoleh dari berbagai narasumber, seperti Staff Disperkim Kota Semarang, anggota Badan Keswadayaan Masyarakat Bandarharjo, bendahara Badan Keswadayaan Masyarakat Bandarharjo dan penerima manfaat program KOTAKU di Bandarharjo. Proses ini membantu peneliti mengidentifikasi inti informasi, menemukan permasalahan utama, serta menyusun data untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan bermanfaat.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah representasi terstruktur dari informasi yang memungkinkan untuk diambilnya tindakan dan penarikan kesimpulan. Mereka berpendapat bahwa penyajian data yang efektif melibatkan penggunaan berbagai jenis grafik, matriks, bagan, dan jaringan sebagai pendekatan utama dalam melakukan analisis kualitatif yang valid. Dalam penelitian ini, tabel data, bagan, dan gambar disajikan untuk mengintegrasikan informasi yang tersusun secara komprehensif.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles & Huberman, verifikasi kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses penelitian, meskipun proses ini juga berlangsung selama penelitian. Evaluasi terhadap validitas, mencakup kebenaran, relevansi, dan kekuatan interpretasi terhadap fakta, merupakan kunci untuk memastikan bahwa kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Validasi kesimpulan harus dilakukan secara kontinu sepanjang tahap pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan akurasi interpretasi hasil penelitian.

1.9.9 Kualitas dan Validitas Data

Validitas data dievaluasi dengan membandingkan hasil tertulis dengan kondisi lapangan, menggunakan standar seperti kebenaran dan ketegasan. Teknik triangulasi data adalah metode untuk mengevaluasi kualitas data. Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi kebenaran data dengan memeriksanya dan membandingkannya dengan sumber lain. Beberapa cara untuk melakukan triangulasi meliputi:

1. Triangulasi sumber melibatkan pengujian validitas dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik mencakup pengujian kredibilitas dengan memeriksa data menggunakan metode yang berbeda.
3. Triangulasi waktu melibatkan pengujian data menggunakan sumber yang sama namun pada periode waktu yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data untuk pengumpulan data. Sumber data meliputi anggota Lembaga Kewasdayaan Masyarakat (LKM), anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan masyarakat Kelurahan Bandarharjo. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian catatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, dalam mencapai tujuannya.